



**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 104 TAHUN 2021**

T E N T A N G

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Jawa

- Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 3.811.388.265.941,00 (tiga triliun delapan ratus sebelas milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp. 648.584.268.098,00 (Enam ratus empat puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 248.621.940.000,00 (Dua ratus empat puluh delapan milyar enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 47.683.673.929,00 (Empat puluh tujuh milyar enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.102.248.169,00 (Enam milyar seratus dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 346.176.406.000,00 (Tiga ratus empat puluh enam milyar seratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh sembilan rupiah).

Pasal 4

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 248.621.940.000,00 (Dua ratus empat puluh delapan milyar enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Air Tanah;
- h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
- j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 23.000.000.000,00 (Dua puluh tiga milyar rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.500.000.000,00 (Tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 7.801.940.000,00 (Tujuh milyar delapan ratus satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 77.500.000.000,00 (Tujuh puluh tujuh milyar lima ratus lima ratus juta rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah).
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 4.320.000.000,00 (Empat milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah).
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 78.000.000.000,00 (Tujuh puluh delapan milyar rupiah).
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 46.500.000.000,00 (Empat puluh enam milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 5

Rincian anggaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 47.683.673.929,00 (Empat puluh tujuh milyar enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha; dan
 - c. Retribusi perizinan.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 38.636.808.179,00 (Tiga puluh delapan milyar enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 5.505.417.750,00 (Lima milyar lima ratus lima juta empat ratus tujuhbelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.541.448.000, (Tiga milyar lima ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 7

Rincian anggaran Retribusi jasa umum, Retribusi jasa usaha dan Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 6.102.248.169,00 (Enam milyar seratus dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN; dan
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN sebagaimana ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000, (Satu milyar rupiah).
- (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 5.102.248.169, (Lima milyar seratus dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).

Pasal 9

Rincian anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN dan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 346.176.406.000,00 (Tiga ratus empat puluh enam milyar seratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Pendapatan Bunga;
 - e. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain;
 - f. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
 - g. Pendapatan dari Pengembalian; dan
 - h. Pendapatan BLUD.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 450.000.000,00 (Empat ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 17.500.000.000,00 (Tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah).
- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 15.000.000.000,00 (Lima belas milyar rupiah).
- (6) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 75.240.000,00 (Tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- (7) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (7) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 12.100.000.000, (Dua belas milyar seratus juta rupiah).
- (8) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 301.001.166.000, (Tiga ratus satu milyar satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Pasal 11

Rincian anggaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain, Pendapatan Denda Retribusi Daerah, Pendapatan dari Pengembalian, dan Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.055.251.411.788,00 (tiga triliun lima puluh lima milyar dua ratus lima puluh satu juta empat ratus sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.790.207.210.000,00 (dua triliun tujuh ratus sembilan puluh milyar dua ratus tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 265.044.201.788,00 (Dua ratus enam puluh lima milyar empat puluh empat juta dua ratus seribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 13

Rincian anggaran Pendapatan transfer pemerintah pusat dan Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp. 107.552.586.055,00 (Seratus tujuh milyar lima ratus lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan hibah; dan
 - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 21.434.337.465,00 (Dua puluh satu milyar empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 86.118.248.590,00 (Delapan puluh enam milyar seratus delapan belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 15

Rincian anggaran Pendapatan hibah dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 4.397.868.785.319,00 (empat triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh milyar

delapan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp 2.969.492.258.828,00 (dua triliun sembilan ratus enam puluh sembilan milyar empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.606.174.905.464,00 (satu triliun enam ratus enam milyar seratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.224.747.006.747,00 (satu triliun dua ratus dua puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0, (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 90.075.575.617,00 (Sembilan puluh milyar tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuh belas rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 48.494.771.000,00 (Empat puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh seribu rupiah).

Pasal 18

Rincian anggaran Belanja pegawai, Belanja barang dan jasa, Belanja bunga, Belanja subsidi, Belanja hibah dan Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp 904.540.910.444,00 (Sembilan ratus empat milyar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;

- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah).
 - (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 120.899.375.167,00 (Seratus dua puluh milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).
 - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 140.288.472.383,00 (Seratus empat puluh milyar dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah).
 - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 619.590.833.919,00 (Enam ratus Sembilan belas milyar lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah).
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 23.687.228.975,00 (Dua puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 20

Rincian anggaran Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c direncanakan sebesar Rp. 44.393.322.131,00 (Empat puluh empat milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu seratus tiga puluh satu rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d direncanakan sebesar Rp. 479.442.293.916,00 (Empat ratus tujuh puluh sembilan milyar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam belas rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 22.065.196.660,00 (Dua puluh dua milyar enam puluh lima juta seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 457.377.097.256,00 (Empat ratus lima puluh tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah).

milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 23

Rincian anggaran Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Anggaran Pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 586.480.519.378,00 (Lima ratus delapan puluh enam milyar empat ratus delapan puluh juta lima ratus sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Penerimaan pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 586.480.519.378,00 (Lima ratus delapan puluh enam milyar empat ratus delapan puluh juta lima ratus sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0, (nol rupiah)

Pasal 25

Rincian anggaran Penerimaan pembiayaan dan Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

BUPATI JEMBER

Ttd

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 27 Desember 2021

Ditandatangani di Jember

pada tanggal 27 Desember 2021

HENDY S

SEKRETARIS DAERAH,



J. MIRFANO

Pembina Utama Madya

NIP. 19630215 199202 1 001

BUPATI JEMBER

Ttd

Desember 2021

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021 NOMOR 104

BUPATI JEMBER

J. MIRFANO

Pembina Utama Madya

NIP. 19630215 199202 1 001

Desember 2021

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Perangkat Daerah	Anggaran
1.01.0.00.0.00.1..0000 DINAS PENDIDIKAN	34.860.000
1.02.0.00.0.00.1..0000 DINAS KESEHATAN	16.689.890.219
1.02.0.00.0.00.2..0000 RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) BALUNG - BLUD	59.145.000.000
1.02.0.00.0.00.3..0000 RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) DR SOEBANDI - BLUD	204.400.000.000
1.02.0.00.0.00.4..0000 RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) KALISAT - BLUD	37.456.166.000
1.03.0.00.0.00.1..0000 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	815.761.504
1.03.1.04.2.10.1..0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	15.000.000
1.05.0.00.0.00.1..0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.160.000
2.09.3.27.0.00.1..0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN	227.500.000
2.11.0.00.0.00.1..0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	110.000.000
2.15.0.00.0.00.1..0000 DINAS PERHUBUNGAN	14.037.320.160
2.16.2.20.2.21.1..0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	540.000.000
2.18.2.10.0.00.1..0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.240.000.000
2.19.0.00.0.00.1..0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	135.000.000
2.22.3.26.0.00.1..0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	3.282.872.000
3.25.0.00.0.00.1..0000 DINAS PERIKANAN	512.500.000
3.27.0.00.0.00.1..0000 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	0
3.31.3.30.0.00.1..0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	12.140.762.760
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	75.000.000
5.02.0.00.0.00.1..0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH - SKPD	3.213.207.741.298
5.02.0.00.0.00.2..0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH	245.320.732.000

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Perangkat Daerah	Anggaran
1.01.0.00.0.00.1..0000 DINAS PENDIDIKAN	1.149.267.555.139
1.02.0.00.0.00.1..0000 DINAS KESEHATAN	440.884.002.160
1.02.0.00.0.00.2..0000 RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) BALUNG - BLUD	59.145.000.000
1.02.0.00.0.00.3..0000 RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) DR SOEBANDI - BLUD	204.400.000.000
1.02.0.00.0.00.4..0000 RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) KALISAT - BLUD	37.456.166.000
1.03.0.00.0.00.1..0000 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	664.221.827.206
1.03.1.04.2.10.1..0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	219.765.575.695
1.05.0.00.0.00.1..0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	20.220.081.413
1.05.4.01.0.00.1..0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	11.487.742.591
1.06.0.00.0.00.1..0000 DINAS SOSIAL	21.524.726.635
2.07.0.00.0.00.1..0000 DINAS TENAGA KERJA	5.126.816.487
2.08.2.14.0.00.1..0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	24.060.903.685
2.09.3.27.0.00.1..0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN	14.052.200.784
2.11.0.00.0.00.1..0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	35.503.359.854
2.12.0.00.0.00.1..0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10.613.901.615
2.13.0.00.0.00.1..0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	14.012.153.815
2.15.0.00.0.00.1..0000 DINAS PERHUBUNGAN	41.623.882.258
2.16.2.20.2.21.1..0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	39.038.025.475
2.17.0.00.0.00.1..0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	12.875.709.890
2.18.2.10.0.00.1..0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7.001.298.876
2.19.0.00.0.00.1..0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	26.161.198.438

Perangkat Daerah	Anggaran
2.22.3.26.0.00.1..0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	15.658.356.248
2.23.2.24.0.00.1..0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5.992.085.259
3.25.0.00.0.00.1..0000 DINAS PERIKANAN	11.820.047.119
3.27.0.00.0.00.1..0000 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	57.062.650.570
3.31.3.30.0.00.1..0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	46.316.657.752
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	102.248.407.045
4.02.0.00.0.00.1..0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	66.008.332.285
5.01.5.05.0.00.1..0000 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	14.594.561.115
5.02.0.00.0.00.1..0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH - SKPD	574.667.290.967
5.02.0.00.0.00.2..0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH	22.318.295.223
5.03.5.04.0.00.1..0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	255.574.470.253
6.01.0.00.0.00.1..0000 INSPEKTORAT	16.238.785.042
7.01.0.00.0.00.1..0000 KECAMATAN AJUNG	3.289.422.693
7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN KALISAT	4.427.768.660
7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN KALIWATES	13.705.040.217
7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN KENCONG	3.329.732.952
7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN LEDOKOMBO	3.231.711.781
7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN MAYANG	3.298.465.553
7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN MUMBULSARI	3.666.829.988
7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN PAKUSARI	3.024.469.247
7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN PATRANG	14.395.800.854
7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN PUGER	3.879.092.900
7.01.0.00.0.00.2..0000 KECAMATAN AMBULU	3.912.530.570

Perangkat Daerah	Anggaran
7.01.0.00.0.00.20.0000 KECAMATAN RAMBIPUJI	3.564.407.949
7.01.0.00.0.00.21.0000 KECAMATAN SEMBORO	3.357.493.039
7.01.0.00.0.00.22.0000 KECAMATAN SILO	3.830.021.962
7.01.0.00.0.00.23.0000 KECAMATAN SUKORAMBI	2.715.389.431
7.01.0.00.0.00.24.0000 KECAMATAN SUKOWONO	3.703.239.196
7.01.0.00.0.00.25.0000 KECAMATAN SUMBERBARU	3.631.218.727
7.01.0.00.0.00.26.0000 KECAMATAN SUMBERJAMBE	3.547.894.593
7.01.0.00.0.00.27.0000 KECAMATAN SUMBERSARI	12.937.986.647
7.01.0.00.0.00.28.0000 KECAMATAN TANGGUL	4.853.119.125
7.01.0.00.0.00.29.0000 KECAMATAN TEMPUREJO	3.095.784.160
7.01.0.00.0.00.3..0000 KECAMATAN ARJASA	3.313.630.287
7.01.0.00.0.00.30.0000 KECAMATAN UMBULSARI	4.348.686.700
7.01.0.00.0.00.31.0000 KECAMATAN WULUHAN	3.582.579.829
7.01.0.00.0.00.32.0000 KECAMATAN PANTI	4.592.814.856
7.01.0.00.0.00.4..0000 KECAMATAN BALUNG	3.438.899.218
7.01.0.00.0.00.5..0000 KECAMATAN BANGSALSARI	3.994.294.791
7.01.0.00.0.00.6..0000 KECAMATAN GUMUKMAS	3.707.827.149
7.01.0.00.0.00.7..0000 KECAMATAN JELBUK	3.221.055.537
7.01.0.00.0.00.8..0000 KECAMATAN JENGGAWAH	3.689.804.680
7.01.0.00.0.00.9..0000 KECAMATAN JOMBANG	3.311.461.979
8.01.0.00.0.00.1..0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.328.243.155

KABUPATEN JEMBER
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	648.584.268.098
4.1.01	Pajak Daerah	248.621.940.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	5.000.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	5.000.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	5.000.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	23.000.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	10.500.000.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	10.500.000.000
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	7.000.000.000
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	7.000.000.000
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	2.000.000.000
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	2.000.000.000
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	3.500.000.000
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	3.500.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	3.500.000.000
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	1.500.000.000
4.1.01.08.01.0001	Pajak Tontonan Film	1.500.000.000
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	0
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	0
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	400.000.000
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	400.000.000
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	0
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	0
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	1.500.000.000
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	1.500.000.000
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	48.000.000
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	48.000.000
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	52.000.000
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	52.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	7.801.940.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	6.651.940.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	6.651.940.000
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	1.000.000.000
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	1.000.000.000
4.1.01.09.04	Pajak Reklame Selebaran	100.000.000
4.1.01.09.04.0001	Pajak Reklame Selebaran	100.000.000
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	50.000.000
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	50.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	77.500.000.000
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	0
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	0
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	77.500.000.000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	77.500.000.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	2.000.000.000
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	2.000.000.000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	2.000.000.000

KABUPATEN JEMBER
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	1.000.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	1.000.000.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	1.000.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.320.000.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	4.320.000.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	4.320.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	78.000.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	78.000.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	78.000.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	46.500.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	46.500.000.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	46.500.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	47.683.673.929
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	38.636.808.179
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	16.645.845.219
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	16.645.845.219
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	242.632.640
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	242.632.640
4.1.02.01.03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	7.500.000
4.1.02.01.03.0002	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat	7.500.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	12.372.582.600
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	12.372.582.600
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	6.724.986.120
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	1.167.517.908
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	1.929.561.480
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	3.627.906.732
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.516.017.600
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.516.017.600
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	2.160.000
4.1.02.01.07.0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	2.160.000
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	477.084.000
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	477.084.000
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	108.000.000
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	108.000.000
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	540.000.000
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	540.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	5.505.417.750
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.253.474.590
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.079.121.790
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	53.652.000
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	108.000.000
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	12.700.800
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	16.200.000
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	16.200.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	43.887.960
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	28.919.160
4.1.02.02.04.0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	14.968.800

KABUPATEN JEMBER
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	545.273.200
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	545.273.200
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	1.109.160.000
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	1.109.160.000
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	157.500.000
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	157.500.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.129.922.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.129.922.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	250.000.000
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	180.000.000
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	70.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	3.541.448.000
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3.240.000.000
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	3.240.000.000
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	11.448.000
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	11.448.000
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	20.000.000
4.1.02.03.04.0002	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan	20.000.000
4.1.02.03.05	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	270.000.000
4.1.02.03.05.0001	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu	270.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.102.248.169
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	1.000.000.000
4.1.03.01.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	1.000.000.000
4.1.03.01.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	1.000.000.000
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	5.102.248.169
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.102.248.169
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.102.248.169
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	346.176.406.000
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	50.000.000
4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	0
4.1.04.01.05.0005	Hasil Penjualan Tanaman	0
4.1.04.01.06	Hasil Penjualan Aset Lainnya	50.000.000
4.1.04.01.06.0002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	50.000.000
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	450.000.000
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	137.500.000
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	137.500.000
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	312.500.000
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	312.500.000
4.1.04.05	Jasa Giro	17.500.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	17.500.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	17.500.000.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	15.000.000.000
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	15.000.000.000

KABUPATEN JEMBER
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	15.000.000.000
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	75.240.000
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	75.240.000
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	75.240.000
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	12.100.000.000
4.1.04.15.01	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	12.100.000.000
4.1.04.15.01.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	12.100.000.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	301.001.166.000
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	301.001.166.000
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	301.001.166.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.055.251.411.788
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.790.207.210.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	2.474.863.520.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	159.266.590.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	18.544.865.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	24.393.970.000
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	2.999.067.000
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	62.283.147.000
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	46.097.778.000
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	29.339.000
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1.343.836.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.655.762.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.918.826.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.607.489.075.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	1.607.489.075.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	77.903.630.000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	4.698.975.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	16.013.789.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	9.034.948.000
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0
4.2.01.01.03.0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	5.522.074.000
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	5.213.539.000
4.2.01.01.03.0029	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Khusus	0
4.2.01.01.03.0030	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	7.228.580.000
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	7.141.041.000
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	5.346.865.000
4.2.01.01.03.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	5.998.331.000
4.2.01.01.03.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	6.974.146.000
4.2.01.01.03.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	4.731.342.000

KABUPATEN JEMBER
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	630.204.225.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	258.721.640.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	257.400.838.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	9.672.000.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	46.765.600.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.913.060.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	52.529.918.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	0
4.2.01.01.04.0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	1.049.773.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	383.914.000
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	1.767.482.000
4.2.01.05	Dana Desa	315.343.690.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	315.343.690.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	315.343.690.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	265.044.201.788
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	259.937.063.431
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	259.937.063.431
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	72.603.710.459
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	34.241.031.245
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	70.909.006.805
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	250.331.630
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	81.932.983.292
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	5.107.138.357
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	5.107.138.357
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	5.107.138.357
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	107.552.586.055
4.3.01	Pendapatan Hibah	21.434.337.465
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	21.434.337.465
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	21.434.337.465
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	21.434.337.465
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	86.118.248.590
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	86.118.248.590
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	86.118.248.590
4.3.03.02.01.0002	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD	86.118.248.590
	Jumlah Pendapatan	3.811.388.265.941
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	2.969.492.258.828
5.1.01	Belanja Pegawai	1.606.174.905.464
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	977.216.048.326
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	726.426.124.790
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	598.001.059.197
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	128.425.065.593
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	75.564.038.337
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	55.814.589.541

KABUPATEN JEMBER
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	19.749.448.796
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	11.296.312.241
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	11.296.312.241
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	36.540.199.818
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	36.540.199.818
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	23.834.820.454
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	9.902.431.082
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	13.932.389.372
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	43.950.437.055
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	32.967.452.803
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	10.982.984.252
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	968.145.803
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	963.866.403
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	4.279.400
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	16.272.864
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12.634.064
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.638.800
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	51.565.321.894
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	45.418.020.548
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	6.147.301.346
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.835.571.509
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.435.734.387
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	399.837.122
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	5.218.803.561
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	4.307.203.100
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	911.600.461
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	181.119.967.958
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	181.096.027.958
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	153.544.027.958
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	27.552.000.000
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	23.940.000
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	23.940.000
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	0
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	351.866.835.977
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	5.416.955.526
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	55.817.210
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	256.450.000
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	39.025.000
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	86.991.631
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	2.542.586.875
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	44.600.000
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	11.150.000
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	874.965.000
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.505.369.810
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	560.656.122

KABUPATEN JEMBER
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	386.340.000
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	155.000.022
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	19.316.100
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	258.705.471.187
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	258.705.471.187
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	72.831.082.142
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	72.831.082.142
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	14.352.671.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12.873.271.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.479.400.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	31.115.138.063
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.120.000.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.120.000.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	159.811.960
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	159.811.960
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	210.998.256
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	210.998.256
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	111.426.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	111.426.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	150.544.800
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	150.544.800
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	67.599.000
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	67.599.000
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	540.771
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	540.771
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	10.838.640.276
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	112.271.508
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.292.192
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.876.576
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	10.717.200.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.796.000.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.796.000.000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	18.900.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	18.900.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	687.148.165
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	67.200.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	67.200.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	10.500.000
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	10.500.000

KABUPATEN JEMBER
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	112.000.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	112.000.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	10.853.500
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	10.853.500
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	402.500
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	402.500
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	5.225
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	5.225
5.1.01.05.07	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.580.000
5.1.01.05.07.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.580.000
5.1.01.05.08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	120.000
5.1.01.05.08.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	120.000
5.1.01.05.09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	360.000
5.1.01.05.09.0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	360.000
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	480.126.940
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	5.000.000
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	23.000.000
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	3.500.000
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	7.801.940
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	227.225.000
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	4.000.000
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1.000.000
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	74.100.000
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	134.500.000
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.495.173.775
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.102.053.775
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.102.053.775
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	62.674.593.200
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	62.674.593.200
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	62.674.593.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.224.747.006.747
5.1.02.01	Belanja Barang	133.354.480.636
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	133.279.480.636
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.010.213.830
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	11.979.092.112
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	14.200.117.234
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	72.208.200
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	31.263.360
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	23.797.180
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.265.553.859
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	3.406.596.430
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	162.137.100
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	1.820.000
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	292.900

KABUPATEN JEMBER
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	310.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.719.855.705
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.499.870.935
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.110.522.373
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	842.762.550
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	19.272.150
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.554.012.990
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	471.329.400
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	915.427.400
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.546.224.710
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.160.351.660
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.206.939.300
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	434.999.150
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.609.155.718
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	35.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	23.457.386.250
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	200.000.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	6.721.124.590
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	344.275.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.685.738.700
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.397.743.400
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	989.280.000
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	1.211.458.250
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.266.053.200
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	11.250.000
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	229.387.500
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	104.250.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	527.432.500
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	311.095.000
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	231.550.000
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	24.750.000
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	18.000.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	189.500.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	287.890.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	1.460.000.000
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	22.500.000
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	75.000.000
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	75.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	526.528.282.763
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	387.068.070.077
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.844.475.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	14.419.800.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	21.640.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	186.600.000

KABUPATEN JEMBER
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	8.100.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	661.200.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	69.843.000.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	56.746.424.680
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	891.520.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	80.000.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	11.313.620.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	20.000.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	6.659.200.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.390.400.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.156.200.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	53.199.580.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.816.420.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	10.215.812.500
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.153.387.500
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	539.600.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	6.862.750.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	879.000.000
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	15.000.000
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	500.000.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	1.300.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	31.018.640.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	150.000.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	57.515.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	74.992.500
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	1.700.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.585.385.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	7.697.300.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	722.757.734
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	41.535.514.413
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	196.484.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.985.730.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	309.844.000
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	319.352.850
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.746.255.900
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	17.094.569.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	150.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	79.994.803.184
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	785.596.524
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	62.697.356.400
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.191.031.200
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	8.655.054.560
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	568.264.500
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	97.500.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	432.000.000
5.1.02.02.03.0005	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	432.000.000

KABUPATEN JEMBER
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.297.172.550
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	250.371.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.615.653.500
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	77.223.400
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	121.647.600
5.1.02.02.04.0058	Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	112.000.000
5.1.02.02.04.0103	Belanja Sewa Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	32.400.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	3.059.774.050
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	297.823.000
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	82.000.000
5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	622.000.000
5.1.02.02.04.0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	26.280.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.986.596.600
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	100.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	491.675.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	2.394.921.600
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	24.821.277.138
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	126.400.000
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	4.263.679.000
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	791.188.500
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	6.227.222.090
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	38.250.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	3.381.595.000
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	8.606.392.648
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	286.322.400
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	265.477.500
5.1.02.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	66.000.000
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	55.000.000
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	213.750.000
5.1.02.02.08.0038	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Konstruksi Proses dan Fasilitas Industrial	500.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	13.262.988.410
5.1.02.02.09.0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	4.000.000.000
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	78.310.400
5.1.02.02.09.0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	1.478.808.000
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	1.758.355.800
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.768.343.510
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	2.740.000.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.439.170.700
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.511.546.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	5.558.216.000

KABUPATEN JEMBER
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	230.930.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	4.722.400.000
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	153.828.804
5.1.02.02.13.0006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	1.750.000
5.1.02.02.13.0007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	8.050.000
5.1.02.02.13.0008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	1.225.000
5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	2.730.679
5.1.02.02.13.0010	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	70.500.625
5.1.02.02.13.0011	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	1.400.000
5.1.02.02.13.0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	350.000
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	25.935.000
5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	41.887.500
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	42.268.042.796
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	2.576.220.189
5.1.02.03.01.0028	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam	400.000.000
5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	2.176.220.189
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.592.231.600
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	710.085.200
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	137.500.000
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	10.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.057.009.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	3.161.050.000
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	159.468.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	453.668.500
5.1.02.03.02.0059	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	400.000
5.1.02.03.02.0086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	107.500.000
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	40.000.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	561.935.400
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	402.015.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	215.170.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	471.000.000
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	61.660.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.036.763.500
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	576.250.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	134.500.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	70.357.000
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	225.900.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	28.500.786.783

KABUPATEN JEMBER
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	15.850.819.783
5.1.02.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	69.660.000
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	252.840.000
5.1.02.03.03.0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	46.827.000
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	2.250.000.000
5.1.02.03.03.0033	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	10.030.640.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	598.804.224
5.1.02.03.04.0009	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus	199.654.224
5.1.02.03.04.0086	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah	174.150.000
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	69.000.000
5.1.02.03.04.0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	156.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	70.429.573.756
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	68.420.423.756
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	32.275.495.400
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	1.200.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.931.283.736
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	936.400.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.077.244.620
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	2.009.150.000
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	2.009.150.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	60.094.358.150
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	56.543.616.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.708.660.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	30.174.240.000
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	5.300.000.000
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	19.360.716.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.550.742.150
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.550.742.150
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	182.845.695.846
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	182.845.695.846
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	182.845.695.846
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	209.226.572.800
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	209.226.572.800
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	209.226.572.800
5.1.05	Belanja Hibah	90.075.575.617
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	87.013.183.117
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	84.528.183.117
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	78.985.512.857
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.542.670.260

KABUPATEN JEMBER
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	840.000.000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	840.000.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.645.000.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.645.000.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.062.392.500
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.062.392.500
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.062.392.500
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	48.494.771.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	40.296.440.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	40.296.440.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	40.296.440.000
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	8.198.331.000
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	8.198.331.000
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	8.198.331.000
5.2	BELANJA MODAL	904.540.910.444
5.2.01	Belanja Modal Tanah	75.000.000
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	75.000.000
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	75.000.000
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	75.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	120.899.375.167
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.581.700.000
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	1.240.680.000
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	1.104.000.000
5.2.02.01.01.0012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	136.680.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	341.020.000
5.2.02.01.03.0002	Belanja Modal Feeder	300.000.000
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	3.556.000
5.2.02.01.03.0006	Belanja Modal Mesin Bor	37.464.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	5.296.543.300
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	5.294.942.500
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	3.510.942.500
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.560.000.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	224.000.000
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.600.800
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	750.000
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	850.800
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	483.531.150
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	3.746.400
5.2.02.03.02.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	3.746.400
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	479.784.750
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	11.400.000
5.2.02.03.03.0007	Belanja Modal Universal Tester	197.000.000
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	15.219.750
5.2.02.03.03.0020	Belanja Modal Alat Ukur Instrument Workshop	1.650.000
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	254.515.000

KABUPATEN JEMBER
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	699.663.110
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	699.663.110
5.2.02.04.01.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	140.033.600
5.2.02.04.01.0007	Belanja Modal Alat Pasca Panen	11.224.510
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	548.405.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.490.440.296
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	4.659.719.360
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	3.365.280
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	186.251.500
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	192.248.100
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	4.277.854.480
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.830.720.936
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	2.563.652.880
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	25.509.220
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	520.105.706
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	8.427.600
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.647.435.500
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	65.590.030
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	30.515.668.790
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	15.113.600.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	15.113.600.000
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	702.068.790
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	162.067.790
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	540.001.000
5.2.02.06.04	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	14.700.000.000
5.2.02.06.04.0001	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System	14.700.000.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	28.267.705.890
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	28.267.705.890
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	8.058.546.060
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	452.118.480
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	9.204.686.900
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	279.221.800
5.2.02.07.01.0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	167.800.000
5.2.02.07.01.0012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	50.361.300
5.2.02.07.01.0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	2.472.710.070
5.2.02.07.01.0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	16.000.000
5.2.02.07.01.0023	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	955.900.000
5.2.02.07.01.0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	3.522.250.000
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	3.088.111.280
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	6.026.290.021
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	4.926.085.531
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	4.493.059.531
5.2.02.08.01.0014	Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi	350.000.000
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	83.026.000
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	1.100.204.490
5.2.02.08.03.0014	Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan	21.716.860
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	1.078.487.630

KABUPATEN JEMBER
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	17.393.655.680
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	16.363.781.700
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	701.470.320
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	15.413.572.880
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	248.738.500
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.029.873.980
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	786.021.580
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	243.852.400
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	450.928.980
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	450.928.980
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	256.486.010
5.2.02.15.02.0002	Belanja Modal Masker	15.323.000
5.2.02.15.02.0003	Belanja Modal Topi Kerja	13.703.000
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	36.202.170
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	129.214.800
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	1.833.247.950
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	1.833.247.950
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	486.032.840
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	1.290.015.110
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	57.200.000
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	18.860.000.000
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	18.860.000.000
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	18.860.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	140.288.472.383
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	133.740.472.383
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	133.740.472.383
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	10.364.052.120
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	557.280.000
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	6.712.241.000
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	14.438.154.013
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	101.659.457.250
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	9.288.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	108.000.000
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	108.000.000
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	108.000.000
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	6.440.000.000
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	6.440.000.000
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	6.440.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	619.590.833.919
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	598.879.340.258
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	592.093.696.758
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	559.212.286.542
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	32.881.410.216
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	6.785.643.500
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	6.785.643.500
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	18.811.493.661
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	17.662.890.096

KABUPATEN JEMBER
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	17.662.890.096
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	750.000.000
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	750.000.000
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	398.603.565
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	398.603.565
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	1.900.000.000
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	1.900.000.000
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	1.900.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	23.687.228.975
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	66.650.000
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	66.650.000
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	66.650.000
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	253.026.850
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	4.465.780
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	4.465.780
5.2.05.02.03	Belanja Modal Tanda Penghargaan	248.561.070
5.2.05.02.03.0001	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	68.888.070
5.2.05.02.03.0002	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	179.673.000
5.2.05.03	Belanja Modal Hewan	1.531.582.500
5.2.05.03.02	Belanja Modal Ternak	1.531.582.500
5.2.05.03.02.0001	Belanja Modal Ternak Potong	781.582.500
5.2.05.03.02.0002	Belanja Modal Ternak Perah	750.000.000
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	24.205.940
5.2.05.05.01	Belanja Modal Tanaman	24.205.940
5.2.05.05.01.0001	Belanja Modal Tanaman	24.205.940
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	6.041.800.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	6.041.800.000
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	762.800.000
5.2.05.08.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	5.279.000.000
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	13.869.963.685
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	13.869.963.685
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	13.869.963.685
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	1.900.000.000
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	1.900.000.000
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	1.900.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	44.393.322.131
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	44.393.322.131
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	44.393.322.131
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	44.393.322.131
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	44.393.322.131
5.4	BELANJA TRANSFER	479.442.293.916
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	22.065.196.660
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	18.268.247.590
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	18.268.247.590
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	18.268.247.590
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	3.796.949.070

KABUPATEN JEMBER
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	3.796.949.070
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	3.796.949.070
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	457.377.097.256
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	457.377.097.256
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	457.377.097.256
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	457.377.097.256
	Jumlah Belanja	4.397.868.785.319
	Total Surplus/(Defisit)	(586.480.519.378)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	586.480.519.378
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	586.480.519.378
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	586.480.519.378
6.1.01.07.02	Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	586.480.519.378
6.1.01.07.02.0001	Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	586.480.519.378
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	586.480.519.378
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
	Pembiayaan Netto	586.480.519.378

BUPATI JEMBER

Ttd

HENDY S

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. MIRFANO
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19630215-199202 1 001